

BAB I

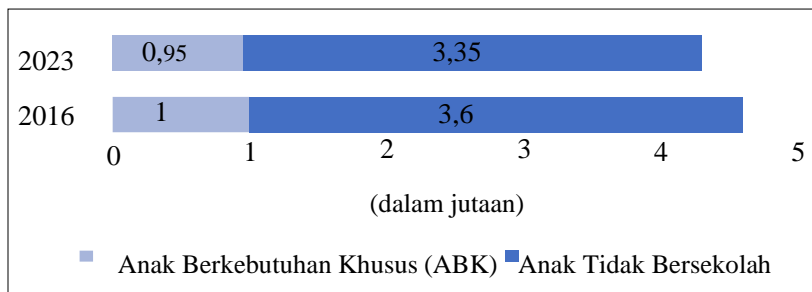
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manajemen layanan pendidikan mengacu pada upaya sistematis untuk memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan yang efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan siswa dan komunitas pendidikan secara keseluruhan, Fullan (dalam Iswahyudi, 2023). Manajemen layanan pendidikan yang sukses melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan siswa, kolaborasi yang erat antar staf pengajar, dan administrasi sekolah, serta penerapan praktik terbaik untuk memastikan keberhasilan setiap siswa.

Pada sekolah dasar yang telah menerapkan kebijakan inklusi, terlihat jelas adanya penambahan layanan yang bertujuan untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Manajemen layanan pendidikan inklusif di sekolah dasar telah menghasilkan perubahan nyata dalam penyediaan layanan pendidikan.

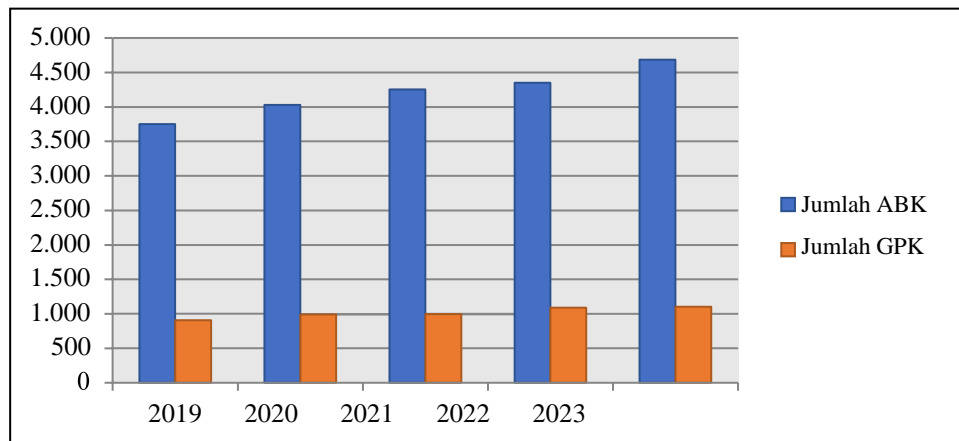
Berdasarkan data statistik terbaru yang tersedia dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, masih terdapat cukup banyak anak usia sekolah di Indonesia yang tidak bersekolah. Temuan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa ada sekitar 4,3 juta anak yang tidak bersekolah. Dari jumlah tersebut, sekitar 950.000 anak adalah anak-anak berkebutuhan khusus (ABK).



Gambar 1.1 Data Anak Tidak Sekolah di Indonesia

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

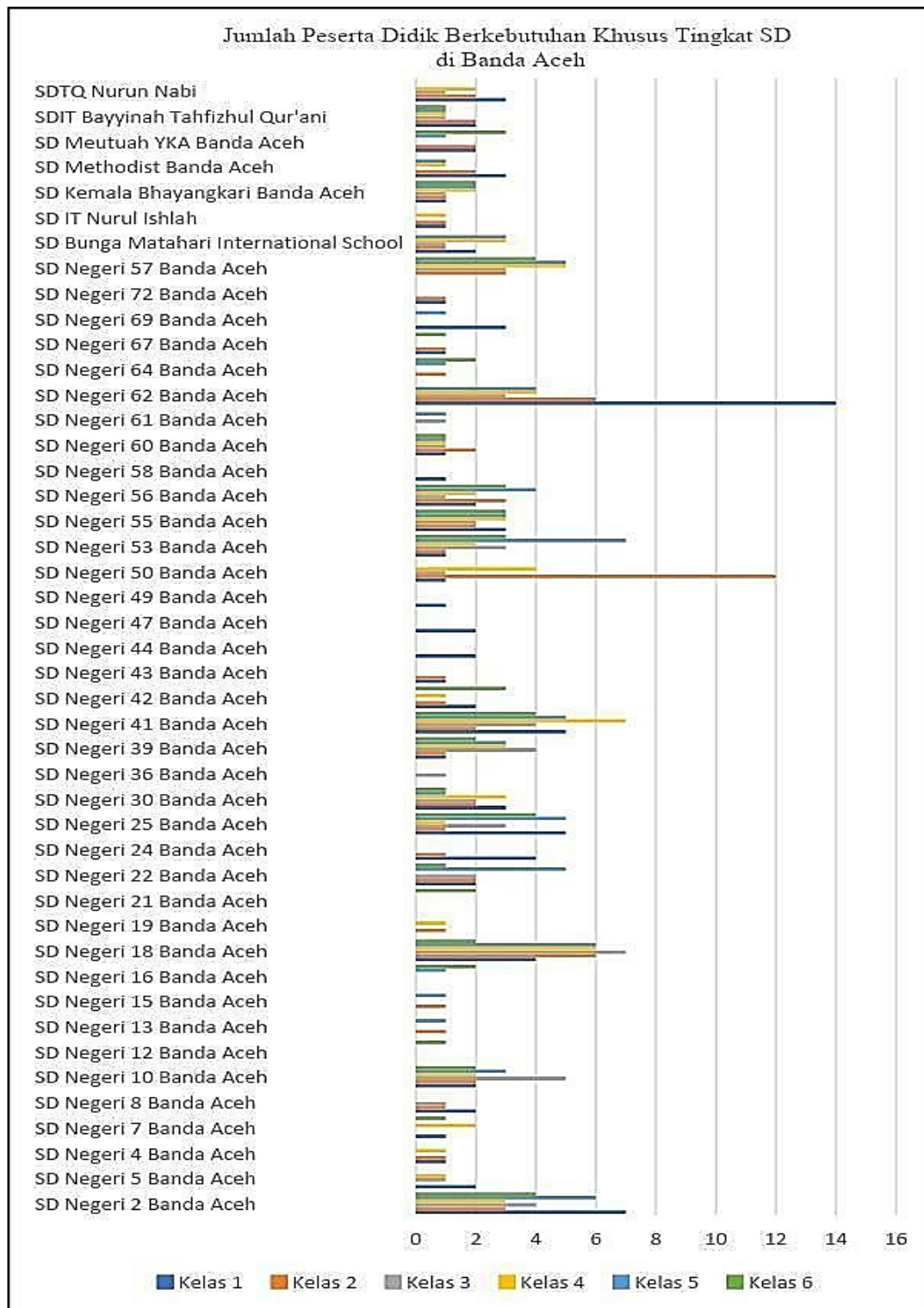
Meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan dengan data tahun 2016, di mana satu juta dari 4,6 juta anak tidak bersekolah adalah ABK, angka ini menunjukkan bahwa masih banyak ABK di Indonesia yang belum mendapatkan hak pendidikan setara dengan anak-anak lainnya (BPS). Seperti dilihat dari gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2 Tren Jumlah Perbandingan ABK dan GPK di Provinsi Aceh
(Sumber: Data Pokok Pendidikan Kemdikbud)

Pada gambar 1.2 diatas, jelas bahwa ABK tersebut membutuhkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Tercatat sejak ditunjukkannya sekolah reguler sebagai sekolah inklusi, terdapat beberapa ABK di sekolah dasar. Jumlah ABK dengan beberapa kategori saat ini terdaftar di beberapa sekolah yang berada dalam wilayah provinsi Aceh. Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan dan memberikan peluang yang setara bagi setiap anak untuk berkembang secara maksimal.

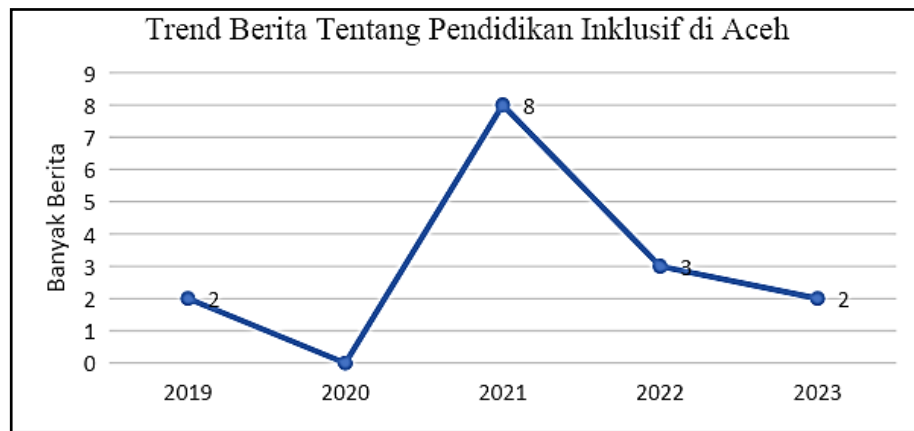
Penting untuk dicatat bahwa sekolah inklusi tidak hanya memberikan kesempatan kepada ABK untuk bersekolah bersama teman sebaya mereka, tetapi juga mengedukasi semua siswa mengenai keberagaman dan toleransi. Dengan meningkatnya jumlah ABK, kebutuhan akan dukungan pendidikan khusus juga semakin mendesak. Oleh karena itu, peran GPK menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa ABK menerima perhatian dan layanan yang tepat.



Gambar 1.3 Data ABK Jenjang Sekolah Dasar Banda Aceh

(Sumber: Dinas Pendidikan Pembina Pendidikan Dasar)

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa hampir seluruh sekolah dasar memiliki ABK dengan berbagai kebutuhannya. Demikian juga dengan media yang menginformasikan isu-isu terkait dengan pendidikan inklusif. Seperti dilihat dari gambar 1.4 berikut.



Gambar 1.4 Beragam Kasus Terkait Layanan Pendidikan Inklusif di Aceh

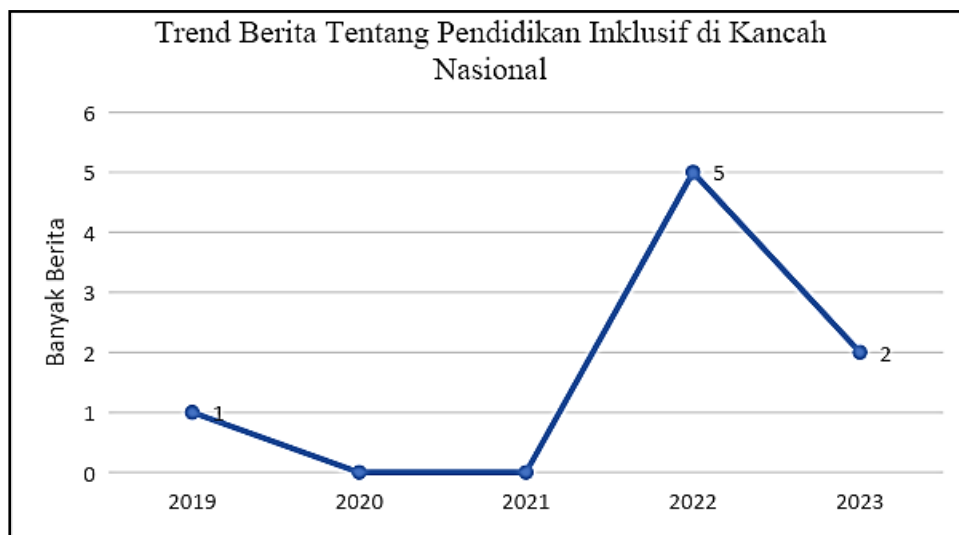
(Sumber : Portal berita Akurat.com)

Pelaksanaan pendidikan inklusif sering terkendala karena sifatnya yang kompleks. Situasi masih terjadi dimana beberapa sekolah inklusi menolak menerima anak berkebutuhan khusus, meskipun kebijakan dan pelatihan terkait sudah ada. Penolakan ABK pun beragam, dengan alasan yang beragam pula. Dikarenakan tidak terdapat guru pendamping khusus, sarana prasarana, tidak zonasi dan juga ada yang karena miskomunikasi.

Salah satu anak penyandang disabilitas, misalnya, ditolak karena rumahnya di Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, dianggap terlalu jauh dari zonasi sekolah atau rayon lain. Oleh karena itu, meskipun sekolah tersebut inklusif, anak tersebut ditolak. Nur Safarina juga merasakan kekecewaan yang sama dengan Zainal terhadap salah satu SMK di Kota Banda Aceh. Emilia, yang berkebutuhan khusus, tidak diizinkan masuk ke sekolah tersebut untuk tahun ajaran 2019-2020. Alasannya, karena tidak ada sekolah yang mau menerima Emilia. Putra M. Darusman Lie dan Nur Safarina ini akhirnya diterima di sekolah tersebut. Ternyata ketidakmampuan akademis Emilia bukanlah alasan penolakannya, melainkan kekurangan anak tersebut yang menjadi dasar

keputusan sekolah untuk mengeluarkannya pada saat itu.

Menurut pasal 1 dan 33 Peraturan Daerah No. 5/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pemerintah Aceh memastikan bahwa setiap orang dengan disabilitas mendapatkan pendidikan. Sesuai dengan Pasal 1, tujuan pendidikan inklusif adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan bantuan khusus yang mereka butuhkan di kelas reguler. Untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam proses pendidikan, pemerintah Aceh, bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota, diwajibkan oleh Pasal 33 untuk menyediakan sumber daya yang memadai untuk pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.



Gambar 1.5 Beragam Kasus Terkait Layanan Pendidikan Inklusif di Tingkat Nasional
(Sumber : Portal berita Akurat.com)

Media secara konsisten melaporkan berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan dan kesempatan yang adil, khususnya dalam konteks pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Dari permasalahan yang telah diidentifikasi, tampak jelas adanya pola dan tren signifikan, terutama penolakan yang berkelanjutan terhadap ABK. Penolakan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dan strategis dalam menangani isu-isu inklusi pendidikan.

Selain itu, guru pembimbing khusus (GPK) juga belum tersedia di beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Sejumlah kasus menunjukkan hasil dari penelitian yang memotret tentang manajemen layanan pendidikan inklusif menemui berbagai permasalahan, dari mulai penerimaan siswa berkebutuhan khusus, perencanaan sekolah, pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana, serta keterkaitan dukungan dari semua pihak. Dalam konteks penelitian, penekanan pada manajemen layanan pendidikan inklusif akan membantu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem manajemen yang mungkin menjadi penyebab utama dari hambatan-hambatan yang teridentifikasi. Hal ini menyangkut dengan alokasi sumber daya, efektivitas pelatihan tenaga pendidik dan ketersediaannya, perencanaan kurikulum yang inklusif, serta integrasi siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam lingkungan belajar yang mendukung.

Melalui berbagai riset, telah diketahui bahwa terdapat banyak kekurangan dalam implementasi inklusi. Salah satu tantangan untuk memaksimalkan implementasi sekolah inklusi di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sekolah inklusi dan peran yang dapat dimainkan oleh masyarakat (Sukomardojo, 2023). Sistem pendukung yang terdiri dari pemerintah, SLB, pakar, perguruan tinggi, SLB, dan peran para ahli yang seharusnya menjadi saluran advokasi, konsultasi, dan pengembangan sumber daya manusia sekolah perlu dikembangkan (Purbasari, 2022).

Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas (Convention on the Rights of Person with disabilities, CRPD) yang diadopsi pada tahun 2006. Konvensi ini menyatakan hak-hak dasar penyandang disabilitas, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif di semua jenjang. Pasal 24 dari CRPD menegaskan bahwa negara harus memastikan bahwa sistem pendidikan mereka bersifat inklusif pada semua tingkat pendidikan. Pendidikan harus menghargai keragaman, mendukung kehadiran siswa dengan kebutuhan khusus dalam lingkungan pendidikan umum, serta memberikan dukungan yang diperlukan agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses belajar.

Deklarasi Salamanca yang dihasilkan pada konferensi Dunia tentang Pendidikan Bagi Anak-Anak Berkebutuhan Khusus di Salamanca, Spanyol, pada tahun 1994,

menjadi salah satu dokumen penting dalam perkembangan pendidikan inklusif. Deklarasi Ini Menggarisbawahi Komitmen Negara-Negara untuk Memasukkan Pendidikan Inklusif Sebagai Bagian Integral dari Sistem Pendidikan. Prinsip Utama Deklarasi Salamanca Adalah Bahwa Pendidikan Inklusif Harus Menjadi Prinsip Dasar dalam Sistem Pendidikan Global, Agenda pendidikan 2030 dan tujuan pembangunan berkelanjutan, “Sustainable Development Goals (SDGs).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, terlihat bahwa pelaksanaan manajemen pendidikan inklusif di Provinsi Aceh, terutama di Kota Banda Aceh, masih mengalami banyak kekurangan. Mulai dari ketiadaan manajemen kurikulum, kekurangan tenaga pendidik, fasilitas, dan perlengkapan, hingga lingkungan yang belum mendukung. Jika ditelaah lebih dalam, hal ini harus menjadi perhatian serius mengingat pentingnya pendidikan inklusif bagi masyarakat Aceh. Di samping itu, pemerintah daerah juga telah mencanangkan Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Gubernur Aceh No. 92 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Meskipun demikian, peraturan tersebut seharusnya dapat menjadi landasan yang kuat untuk mendukung program pendidikan inklusif di Aceh. Oleh karena itu, perlu adanya upaya nyata untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya guna memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Melalui ketentuan tersebut, upaya konkret diarahkan untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat memperoleh akses yang setara dalam dunia pendidikan.

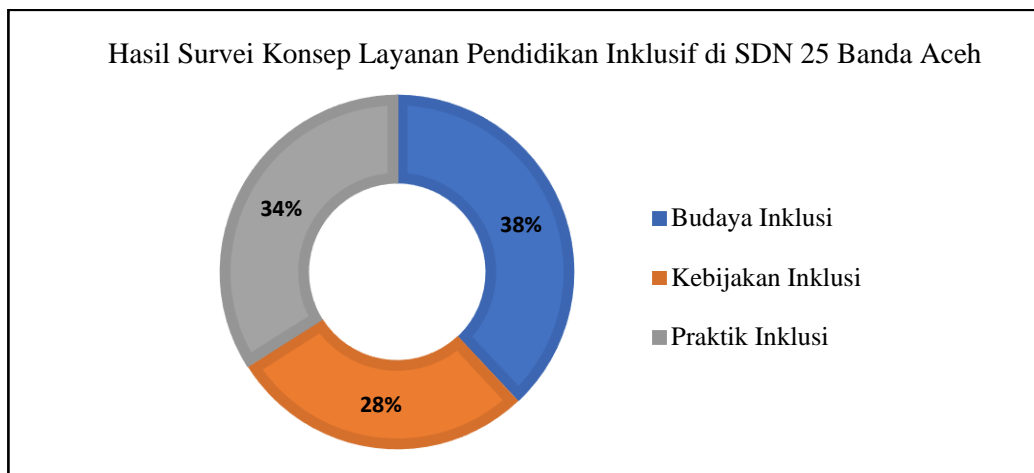
Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh telah menunjuk sekolah-sekolah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, langkah ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penyediaan lingkungan belajar yang inklusif, dimana perbedaan diakui, dihormati dan disetarakan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan setiap peserta didik, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka, sesuai dengan semangat kebijakan inklusi di Aceh.

Sepanjang tahun 2016 hingga 2021 peneliti menemukan banyak permasalahan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kota Banda Aceh seperti penolakan sekolah untuk menerima siswa berkebutuhan khusus dengan beragam alasan. Beberapa alasan tersebut yaitu; tidak adanya tenaga pendidik khusus, tidak tersedianya sarana dan prasarana dan hasil survei tahun 2021 yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa sebagian besar guru belum memahami konsep pendidikan inklusi.

Untuk menanggapi tantangan tersebut, peneliti melaksanakan studi di tiga Sekolah Dasar di Banda Aceh SDN 25, SDN 56, dan SDN 20. Penelitian ini bertujuan untuk menjadikan ketiga sekolah tersebut sebagai pilot project untuk inisiatif "Sekolah Ramah Anak" atau Child Friendly School di Aceh. Inisiatif ini bertujuan untuk mengembangkan model yang efektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung dan inklusif, sekaligus memberikan contoh praktis bagi sekolah-sekolah dasar lain.

Peneliti berkolaborasi dengan P4TK TK PLB untuk menyelenggarakan pelatihan bagi ketiga sekolah pilot project ini, penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Pelatihan tersebut fokus pada pemahaman mendalam tentang konsep layanan pendidikan inklusif, serta implementasi kebijakan, budaya, dan praktik yang relevan. Temuan dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pelatihan dan penerapan kebijakan inklusi di ketiga sekolah tersebut, tetapi juga memberikan dasar bukti yang kuat untuk perbaikan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di masa depan.

Dengan analisis yang komprehensif dan evidence-based (berbasis bukti) adalah pendekatan yang mengutamakan penggunaan bukti terbaik yang tersedia dalam pengambilan keputusan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan pendidikan inklusif yang lebih responsif dan efektif. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjadi referensi bagi pengembangan model sekolah ramah anak yang dapat diadopsi secara lebih luas di seluruh Aceh, serta untuk memperkuat kerangka kerja inklusi pendidikan di tingkat nasional.



Gambar 1.6 Hasil survei konsep layanan pendidikan inklusi di SDN 25 Banda Aceh

Sumber: (Hasil penelitian terdahulu)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, serta dokumen, survei menggunakan indeks inklusi yang diharapkan 100% di 3 (tiga) sekolah target program sekolah ramah di Provinsi Aceh menyimpulkan bahwa budaya inklusi pada Sekolah Dasar Negeri 25 Banda Aceh yaitu: sebesar 38%, indeks kebijakan sebesar 28%, dan indeks praktik inklusif sebesar 34%. Dari laporan di atas, maka teridentifikasi kelemahan-kelemahan dalam manajemen layanan pendidikan inklusif. Dengan demikian, peneliti akan mengedepankan manajemen layanan pendidikan inklusif.

Hasil peneliti tahun 2021 terhadap 3 sekolah reguler yaitu SDN 25, 56 dan 20 bahwa teridentifikasi sekolah tersebut memiliki beragam anak berkebutuhan khusus, namun, hasil temuan adalah di SDN 56 hanya Kepala Sekolah dan 2 orang guru yang paham konsep pendidikan inklusif, dengan segala keterbatasannya. Demikian juga dengan SDN 20 teridentifikasi ada beberapa ABK di sekolah tersebut. Berbeda dengan SDN 25, jumlah ABK lebih banyak dan sekolah menerima untuk masuk ke sekolah tersebut.

Bersama P4TK TK PLB, memberikan pelatihan dalam layanan untuk anak berkebutuhan khusus, dalam masa 3 bulan lamanya. Namun seiring berjalannya waktu, banyak peristiwa, dan perubahan terjadi, bahkan salah satu sekolah yang telah menerima pembekalan untuk layanan anak berkebutuhan khusus ini, didapati masih

menolak menerima anak berkebutuhan khusus, di tahun 2023 ini. Dan SD yang awalnya telah menjadi sekolah inklusi dan sekolah ramah anak atau Child Friendly School, hari ini tidak lagi disebut sebagai sekolah inklusi dan dari dinas pendidikan tidak mengeluarkan lagi kebijakan sekolah inklusi di sekolah tersebut.

Pada tahun 2023 tanggal 2 Januari, kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh baru mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Penunjukkan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Jenjang SD Kota Banda Aceh, Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 265 Tahun 2016 Tentang penunjukan Sekolah/madrasah Penyelenggara Model Pendidikan Inklusi Di Kota Banda Aceh. Sekolah Dasar yang ditunjuk sejumlah 16 sekolah dasar. Dan Pada Tahun 2023, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, mengeluarkan SK Tentang: Penunjukan, ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2023, dengan jumlah 9 Sekolah Dasar. Dari data empiris tersebut jelas bahwa dari tahun 2016 ke 2023, baru di Januari 2023 terbit Surat Keputusan baru terkait pendidikan inklusif. Selama 7 tahun perjalanan pendidikan inklusif ini mengalami dinamika yang kompleks. Sedikit sekali perhatian pemerintah maupun masyarakat yang terlibat peduli terhadap layanan pendidikan inklusif ini. Maka berdasarkan fenomena ini, peneliti tergerak untuk membantu atas dasar kepedulian terhadap hak pendidikan yang layak untuk siswa berkebutuhan khusus.

Hal tersebut juga didukung dengan mengidentifikasi kajian *literature* riset terdahulu, apakah riset tersebut berkontribusi langsung dalam memberikan solusi yang tepat yang dibutuhkan oleh sekolah dan menjawab permasalahan dalam layanan pendidikan inklusif di Aceh. Karena riset yang dilakukan kurang mendalam dan berkontribusi langsung kepada sekolah, guru, siswa berkebutuhan khusus, orang tua, dan masyarakat yang terlibat.

Pemerintah dalam implementasi kebijakan inklusif ini tampak belum serius menjalankan amanah kebijakan ini, dan dari data empiris ini terbukti bahwa terjadi penurunan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK). Berdasarkan data empiris penelitian tentang manajemen pendidikan inklusi sangat jarang dilakukan dan belum dilakukan riset mendalam tentang manajemen layanan pendidikan inklusi. Penelitian oleh Muhammad Haikal tentang manajemen pendidikan inklusif di Banda

Aceh menuliskan tentang “Analisis Implementasi Pendidikan Inklusif di Provinsi Aceh”; Budaya, Kebijakan, dan Pelaksanaan. Sama halnya dengan riset peneliti untuk ke tiga sekolah terdahulu. Dalam risetnya, Haikal menyarankan agar Pemerintah Daerah Aceh menerapkan pendidikan inklusi dengan menerapkan *Index For Inclusion*, sama dengan yang dilakukan peneliti dalam mengambil data di 3 sekolah yaitu menggunakan *Index Inclusion*. Dan mulai memperkuat budaya inklusif sebelum melanjutkan ke kebijakan dan implementasi. Dalam hal manajemen, sedikit sekali ditemukan di Aceh yang meneliti tentang ini.

Masalah ini memiliki urgensi yang tinggi untuk diteliti dan ditelaah kembali. Penelitian yang mendalam mengenai hambatan-hambatan tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kompleksitas isu manajemen layanan pendidikan inklusif dan membantu dalam mengidentifikasi solusi yang lebih efektif. Pendidikan inklusif merupakan prinsip yang diakui secara luas dalam kebijakan pendidikan internasional dan nasional. Misalnya, Konvensi Hak Anak oleh PBB dan Undang-Undang Pendidikan Nasional di berbagai negara menekankan pentingnya memberikan akses pendidikan yang setara kepada semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara efektif di tingkat sekolah dasar.

Manajemen layanan pendidikan inklusif yang efektif berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua siswa, bukan hanya mereka dengan kebutuhan khusus. Dengan menerapkan strategi inklusif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang lebih adaptif dan responsif terhadap berbagai gaya belajar dan kebutuhan individu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan.

Banyak sekolah telah menerapkan program inklusif, namun efektivitas implementasinya sering kali bervariasi. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi praktik manajerial yang ada, mengidentifikasi tantangan, dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan. Ini membantu memastikan bahwa program inklusif tidak hanya sekedar kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar efektif dalam praktik.

Salah satu tantangan utama dalam pendidikan inklusif adalah pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Penelitian tentang manajemen layanan pendidikan inklusif dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang spesifik dan membantu merancang program profesional yang lebih efektif. Ini penting untuk memastikan bahwa guru memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus.

Lingkungan pendidikan inklusif tidak hanya mempengaruhi hasil akademik tetapi juga kesejahteraan sosial dan emosional siswa. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana manajemen layanan inklusif mempengaruhi dinamika sosial di dalam kelas, hubungan antar siswa, dan bagaimana hal ini berkontribusi pada pengembangan sosial dan emosional siswa secara keseluruhan.

Sekolah dasar di berbagai wilayah mungkin menghadapi tantangan yang berbeda dalam mengelola layanan pendidikan inklusif. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan model yang relevan untuk konteks lokal, memungkinkan penyesuaian dan penerapan strategi yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik komunitas sekolah. Penelitian ini memungkinkan pengumpulan perspektif dari berbagai stakeholder, orang tua, dan staf sekolah, tentang bagaimana manajemen layanan pendidikan inklusif berdampak pada mereka. Memahami pandangan dan pengalaman mereka dapat memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif.

Studi ini bisa membuka jalan bagi inovasi dalam pendekatan manajerial untuk pendidikan inklusif. Dengan mengeksplorasi dan menganalisis berbagai model manajemen, penelitian ini dapat menghasilkan ide-ide baru dan strategi inovatif yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah lain, meningkatkan praktik pendidikan inklusif secara lebih luas. Berdasarkan alasan-alasan ilmiah ini, penelitian tentang manajemen layanan pendidikan inklusif di sekolah dasar tidak hanya penting tetapi juga krusial untuk memajukan pendidikan yang adil dan berkualitas untuk semua siswa.

Beberapa fakta dan data lainnya menunjukkan bahwa kebijakan inklusi dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Melalui penelitian yang teliti, telah terbukti bahwa lingkungan belajar inklusif dapat meningkatkan keterlibatan siswa,

memperluas jangkauan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa, membangun toleransi serta pemahaman yang lebih baik di antara siswa. Oleh karena itu, layanan pendidikan inklusif memerlukan inovasi dalam manajemen tenaga kependidikan yang mencerminkan prinsip inklusivitasnya. Untuk mencapai *Universal Primary Education (UPE)* yang inklusif, diperlukan reformasi dalam organisasi dan pedagogi, Budiyanto (dalam Rosyid, 2020).

Di seluruh dunia, siswa penyandang disabilitas semakin dididik bersama rekan-rekan nondisabilitas mereka dalam praktik yang dikenal sebagai inklusi. Inklusi ditampilkan secara mencolok dalam sejumlah deklarasi internasional, hukum nasional, dan kebijakan pendidikan. Kebijakan-kebijakan ini, ditambah dengan upaya para advokat untuk hak-hak penyandang disabilitas, telah menyebabkan peningkatan substansial dalam jumlah siswa penyandang disabilitas yang menerima sekolah bersama rekan-rekan mereka yang nondisabilitas.

Pendidikan inklusif tidak hanya untuk siswa penyandang cacat, tetapi bagi semua anak, karena bukti manfaatnya sudah terbukti berhasil. Laporan ini merupakan hasil tinjauan sistematis terhadap 280 studi dari 25 negara. Delapan puluh sembilan studi memberikan bukti ilmiah yang relevan dan disintesis, ada bukti yang jelas dan konsisten bahwa pengaturan pendidikan inklusif dapat memberikan substansial manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi siswa dengan dan tanpa disabilitas, Hehir (dalam Setiawan, 2022).

Menurut temuan dari beberapa studi kasus, "Reformasi pendidikan calon guru saat ini diperlukan untuk persiapan guru untuk sekolah inklusi" (Budiyanto, 2017; Yuliastuti, 2019). Demikian pula, standar kompetensi guru adalah ukuran yang didasarkan pada bidang tugas, kualifikasi, dan tingkat pendidikan yang menentukan atau mensyaratkan penguasaan, pengetahuan, dan perilaku yang layak bagi seorang guru untuk menduduki jabatan fungsional (Majid, 2008; Berlian 2023).

Sistem guru pendamping tampaknya menjadi model alternatif yang paling berhasil untuk memasukkan siswa berkebutuhan pendidikan khusus ke dalam sekolah konvensional, berdasarkan temuan studi kasus yang dirangkum oleh Budiyanto (dalam Switri, 2022). Konsep pendidikan inklusif merupakan hal yang baru di lanskap

pendidikan nasional dan dunia. Mengesampingkan gagasan filosofi dan nilai-nilai dasar, karena pada intinya, konsep ini berfungsi sebagai panduan untuk mendefinisikan peran dan pemberdayaan pendidikan, mendefinisikan ciri dan karakteristik masyarakat, dan mengidentifikasi isu-isu strategis dalam pendidikan (Depdiknas, 2002).

Pandangan dunia yang homogen dan menyamaratakan juga dihilangkan dengan tumbuhnya kesadaran akan keragaman. Perbedaan kini dipandang sebagai anugerah yang harus disyukuri, bukan sebagai anomali yang harus diabaikan (Mulyono, 2002; Futaqi, 2023). Untuk itu, semua pendidik harus memiliki kualifikasi untuk memberikan layanan inklusif kepada setiap anak. Ika (2020), seperti yang disebut oleh Meijer, dkk. (1997), membedakan pendidikan untuk keragaman ini.

Menurut Saadati (2019), inklusi didasarkan pada gagasan bahwa individu atau orang dewasa beroperasi dalam komunitas yang inklusif, berinteraksi dengan individu dari berbagai latar belakang ras atau suku, keyakinan agama, dan sudut pandang. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Etscheid (2002). Dengan cara yang mirip, siswa dari segala usia harus berkembang dalam lokasi di mana anak suatu hari nanti akan bekerja.

Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan layanan terbaik bagi siswa umum dan siswa berkebutuhan khusus dengan menyediakan akses dan dukungan yang memadai. Namun, penting untuk diingat bahwa layanan pendidikan inklusif tidak hanya berfokus pada penyediaan objek fisik, tetapi juga melibatkan aspek-aspek *intangibile*. Aspek tersebut meliputi kehadiran guru atau tenaga kependidikan yang berkompeten. Menurut Daniel (dalam Yunita, 2019), Guru di sekolah semacam ini bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Definisi ini menjelaskan bahwa pendidikan inklusif memperlakukan ABK setara dengan anak yang tidak ABK. Oleh karena itu, guru bertanggung jawab penuh untuk mengawasi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, para pendidik harus mampu menangani berbagai macam keragaman siswa.

Meskipun teori ini relevan dengan konteks prasekolah, Wilson (dalam Ahmad, 2020) memberikan contoh berikut. Jika sistem pendidikan saat ini di pelajari dengan seksama, maka dapat dibandingkan dengan struktur bisnis, di mana semua karyawan disibukkan dengan pekerjaan mereka sendiri dan tidak peduli dengan orang lain.

Meskipun lingkungan sekolah pada umumnya berfokus pada pertumbuhan otak, sekolah juga mengajarkan siswa untuk menjadi lebih peka terhadap lingkungan mereka. Menurut pernyataan ini, sistem sekolah harus memberikan penekanan yang sama pada dimensi mentalitas selain pertumbuhan kognitif. Lebih lanjut, Wilson menyatakan bila Anda mencermati tujuan sekolah-sekolah secara terpadu dan memikirkan cara pembelajaran untuk keuntungan semua siswa, itulah yang dinamakan pendidikan inklusif.

Menurut Sari (2020), Filosofi Pancasila dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", merupakan landasan filosofis utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia. Filosofi ini mengakui Indonesia sebagai bangsa yang multikultural, multietnis, dan multibahasa, serta memandang adat istiadat, agama, dan kepercayaan sebagai kekayaan yang harus dilindungi, ditegakkan, dan dikembangkan di dalam batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menyiratkan bahwa keragaman kini dipandang sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai fungsi dari siapa, apa, suku, warna kulit, agama, atau budaya. Meskipun berbeda, pasti ada kelebihan dan kekurangan dari setiap variasi. Anak-anak yang memiliki kebutuhan unik pasti juga memiliki kelebihan yang tersembunyi di balik kekurangannya.

Ide dasar di balik pendidikan inklusif adalah agar anak-anak dapat hidup dan belajar bersama (Nurfadhillah, 2021). Pandangan lain yang dikemukakan oleh Johnsen & Skojen (dalam Kurniawati, 2021) bahwa: (1) setiap anak memiliki tempat di masyarakat dan di kelas atau kelompok; (2) hari sekolah sepenuhnya terstruktur dengan tugas-tugas pembelajaran kooperatif yang mengakomodasi berbagai latar belakang pendidikan dan memungkinkan adanya fleksibilitas dalam memilih; dan (3) guru berkolaborasi untuk memperoleh pengetahuan pendidikan umum, teknik pembelajaran khusus dan individual, kebutuhan pelatihan, dan kemampuan untuk mengenali keragaman dan perbedaan individu dalam organisasi kelas.

Guru mata pelajaran, GPK, dan guru kelas merupakan contoh pendidik. Oleh karena itu, para pendidik harus mampu mengawasi kelas dan menguraikan pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan inklusif. Mengingat bahwa siswa harus memahami contoh-contoh spesifik untuk mendapatkan pengetahuan di tingkat sekolah dasar. Agar

pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan, guru juga harus mampu berinteraksi dengan siswa (Yunoyo & Winarti, 2021).

Kepala sekolah sebagai manajer di sekolah, guru, dan SDM sekolah memiliki peran yang sangat vital dalam menjalankan manajemennya untuk peningkatan mutu pendidikan dan layanan secara inklusif. Kesempatan belajar yang sama bagi semua anak, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus mereka, adalah tujuan dari pendekatan pendidikan inklusif. Dalam hal ini, pencapaian tujuan pendidikan inklusif dikaitkan dengan peran nyata yang dimainkan oleh konstituen-konstituen tersebut. Pada kenyataannya, sejumlah faktor, termasuk keyakinan, peraturan sekolah, kolaborasi dan koordinasi antara pendidikan khusus dan instruktur kelas, dan keterampilan instruksional guru, mempengaruhi seberapa baik pendidikan inklusif untuk siswa penyandang cacat diimplementasikan, Chopra (dalam Muslimin 2021).

Tindakan membujuk, memotivasi, mengarahkan, dan mengorganisir guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan pemangku kepentingan lainnya dikenal sebagai kepemimpinan kepala sekolah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas guru, kepala sekolah memiliki peran yang sama pentingnya, E. Mulyasa (dalam Syahputra, 2023). Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah tidak diragukan lagi memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, keahlian teknis dalam mengelola sekolah, kemampuan analisis yang tajam dalam pengambilan kebijakan, dan yang paling penting, kompas moral yang kuat, keberanian dalam membuat penilaian, dan etos kerja yang kuat. Beliau tidak mudah terpengaruh oleh faktor-faktor yang tidak terkait dengan perannya sebagai kepala sekolah.

Selain itu, Muslimin (2021) menyatakan bahwa kepala sekolah harus terus berupaya merencanakan program-program yang bermanfaat, baik dalam bentuk bangunan fisik maupun non fisik, seperti menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Hal ini mengharuskan mereka untuk terus memberikan informasi kepada seluruh sumber daya manusia di sekolah. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif dan optimis terhadap prinsip pendidikan inklusif memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas proses pembelajaran ketika

lingkungan dan kebijakan inklusif diimplementasikan dengan benar.

Sebagai negara yang sedang mengalami perkembangan, Indonesia sebagai negara multikultural membutuhkan SDM yang berkualitas. Hal ini tidak hanya berarti memiliki sikap yang terpuji, tetapi memiliki keterampilan profesional yang diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan masyarakat. Kualifikasi SDM seperti ini menjadi modal dasar bagi negara untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, berkepribadian, maju, mandiri dan sejahtera.

“*Manager* adalah peran khusus, sama seperti guru sekolah dasar dan ahli bedah jantung adalah peran khusus”. Pernyataan ini menyiratkan bahwa “*manager*” atau orang yang melakukan manajemen adalah peran yang spesifik, seperti halnya menjadi guru sekolah dasar atau ahli bedah jantung. Dalam konteks ini, “*manager*” mengacu pada seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi pekerjaan tim atau departemen dalam suatu organisasi. Sumber referensi untuk pernyataan ini adalah buku “*The Making of A Manager*” yang ditulis oleh (Julie Zhuo, 2019). Dengan menggunakan manajemen yang baik, sekolah dapat mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pendidikan inklusi dan memberikan layanan yang tepat bagi siswa berkebutuhan khusus. Penting bagi sekolah untuk mengembangkan kapasitas manajerial mereka dan mendukung pengembangan profesional guru dalam konteks inklusi.

Berkembangnya berbagai perspektif mengenai definisi layanan menunjukkan signifikansi dan dinamika peran layanan dalam perekonomian global. Perkembangan layanan pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari peningkatan aktivitas pada tahap kuiner, yaitu upaya perbaikan dan peningkatan kapasitas manusia. Faktor layanan juga telah menjadi pembeda dan kunci keunggulan dalam persaingan. Dari perspektif bisnis, menciptakan dan menyediakan layanan khusus adalah salah satu metode terbaik untuk menonjol dari persaingan dan membangun posisi yang berbeda (Tjiptono, 2022).

Menurut Kustawan (dalam Martha, 2019), Sistem pendidikan yang inklusif berarti menerima siswa dari berbagai latar belakang dan menyesuaikan program-programnya untuk memenuhi kebutuhan unik mereka. Memahami pentingnya

mengintegrasikan siswa penyandang disabilitas ke dalam kurikulum, lingkungan sekolah, dan interaksi sosial merupakan hal yang dimungkinkan oleh ide inklusi (Fauzan, 2022).

Makna lokasi yang ditunjukkan oleh nama sekolah tidak membatasi kemampuan seseorang untuk implementasi pendidikan inklusif. Sesuai dengan Jannah (2021), tujuan didirikannya sekolah inklusi adalah untuk menghapus eksklusivisme dari masyarakat. Sekolah inklusi adalah sekolah umum yang menggabungkan siswa berkebutuhan khusus (PDBK) dan siswa reguler (PDR) dalam satu kelas. Sebaliknya, sekolah luar biasa bekerja untuk memungkinkan semua siswa untuk mencapai potensi penuh mereka dan menjadi mandiri.

Dalam rangka mengimplementasikan manajemen pendidikan yang berkualitas untuk pendidikan inklusif, guru, kepala sekolah, dan sumber daya manusia (SDM) sekolah memainkan peran penting. Kesempatan belajar yang setara adalah tujuan dari pendidikan inklusif, yang mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan sejarah unik setiap siswa. Dalam hal ini, elemen-elemen tersebut memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan inklusif yang efektif.

Secara umum, kolaborasi dan sinergi antara pendidik, administrator, dan personil sekolah sangat penting untuk pencapaian pendidikan inklusif. Dengan memainkan peran yang saling melengkapi, mereka dapat memastikan bahwa anak memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil di sekolah, menumbuhkan lingkungan belajar yang inklusif, dan menawarkan pendidikan yang berkualitas tinggi kepada semua anak. Fakta bahwa guru pendidikan khusus efektif dalam meningkatkan prestasi dan pembelajaran siswa berarti bahwa pekerjaan mereka akan selalu dihargai (Amalia & Farida, 2021).

Tujuan dari praktik inklusif adalah untuk menjamin bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dan berkontribusi semaksimal mungkin dalam lingkungan belajar yang setara dan adil. Menurut Engkoswara (2001), yang mendefinisikan manajemen sebagai ilmu yang mengatur sumber daya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dengan sukses dan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi manusia yang terlibat dalam

mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu. Mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang efektif, efisien, otonom, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah inti dari manajemen pendidikan.

Memperkuat pengembangan guru melalui pelatihan yang berkelanjutan merupakan hal yang penting dalam bidang pendidikan. Untuk memajukan keahlian mereka, para pendidik harus mengejar pengembangan profesional yang berkelanjutan. Program pengembangan profesional yang komprehensif harus disediakan untuk menjamin bahwa guru memiliki kemampuan dan karakteristik yang diperlukan untuk memberikan pengajaran yang berkualitas tinggi. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa kompetensi pendidikan, kepribadian, sosial, dan profesional merupakan persyaratan bagi guru. Pedoman Teknis Program Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus (2020) memperjelas hal ini.

Guru profesional dicirikan oleh seperangkat kompetensi yang kohesif dan holistik. Guru harus terus belajar seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kualitas pembelajaran di kelas sangat dipengaruhi oleh peran pengajar. Oleh karena itu, kompetensi guru perlu terus ditingkatkan, baik oleh guru itu sendiri maupun oleh pihak-pihak lain yang terlibat dalam peningkatan kompetensi tersebut. Diharapkan dengan meningkatkan standar pengajaran di kelas, maka akan meningkatkan standar pendidikan. Selain itu, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan jumlah guru dengan jumlah ABK. Masalah ini diperparah oleh ketidakseimbangan dalam distribusi guru yang mempengaruhi efektivitas pemenuhan kebutuhan guru, baik dari segi jumlah maupun jenis guru yang diperlukan.

Dari data jumlah perbandingan ABK dengan GPK di Indonesia dan di Provinsi Aceh, dapat dilihat bahwa jika di rata-ratakan masing-masing GPK di Indonesia mendampingi 5 orang ABK. Sementara di Provinsi Aceh masing-masing GPK mendampingi 4 orang ABK. Hal ini sungguh sangat disayangkan mengingat idealnya satu orang GPK mendampingi 1-2 orang ABK saja. Faktanya di SDN 25 Kota Banda Aceh 2 GPK menangani 19 ABK.

Tujuan dari pendidikan inklusif, yang sangat mengagumkan, adalah untuk

memberikan semua orang, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, akses yang sama terhadap pendidikan. Hal ini mencakup penghargaan terhadap berbagai nilai, menciptakan suasana belajar yang ramah bagi setiap siswa, dan memberikan bantuan yang mereka butuhkan untuk mewujudkan potensi terbesar mereka.

Secara keseluruhan, inklusivitas merupakan konsep yang menekankan pada keadilan, kesetaraan. Manajemen layanan pendidikan merupakan pendekatan yang penting dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien. Dengan fokus pada layanan yang menyeluruh, manajemen layanan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengakomodasi kebutuhan siswa, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Manajemen layanan pendidikan inklusif di sekolah dasar telah menghasilkan perubahan yang nyata dalam penyediaan layanan pendidikan. Dengan penerapan pendekatan ini, terlihat penambahan layanan yang bertujuan untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Namun, tantangan dalam manajemen layanan inklusi juga tidak boleh diabaikan. Diperlukan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, dan kolaborasi yang erat antara semua pemangku kepentingan di sekolah untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan inklusi. Dengan demikian, kebijakan inklusi bukan hanya sekedar perubahan kebijakan, melainkan sebuah katalisator untuk transformasi pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Melalui manajemen layanan inklusi yang terarah, sekolah dasar dapat menjadi tempat di mana setiap siswa merasa diterima, didukung, dan diberi kesempatan untuk berkembang secara maksimal. Fakta dan data dalam penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen layanan pendidikan telah membawa manfaat signifikan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh lembaga riset pendidikan, implementasi manajemen layanan pendidikan di sekolah-sekolah telah terbukti mengurangi tingkat putus sekolah, meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan memperbaiki komunikasi antara sekolah, siswa, dan orang tua. Maka manajemen layanan inklusi memainkan peran kunci dalam mewujudkan visi inklusi ini.

Berdasarkan data yang disajikan dalam latar belakang, beberapa sekolah menerima anak berkebutuhan khusus ini tanpa penolakan. Beberapa sekolah menyadari

bahwa anak yang mereka terima adalah anak berkebutuhan khusus, namun beberapa sekolah tidak menyadari bahwa anak yang diterima di sekolah adalah anak yang berkebutuhan khusus. Demikian juga dengan Sekolah Dasar Negeri 25 Banda Aceh, merupakan sekolah yang menerima ABK.

Sejak tahun 2016, SD Negeri 25 Banda Aceh telah memperoleh Surat Keputusan (SK) untuk menjadi sekolah inklusi, menandakan komitmennya dalam menyediakan pendidikan yang lebih inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Di Kota Banda Aceh, beberapa sekolah telah ditunjuk untuk menjalankan peran sebagai sekolah inklusi, sebuah langkah penting menuju integrasi pendidikan. SD Negeri 25 Banda Aceh, dalam kapasitasnya sebagai sekolah inklusi, menerima ABK dengan berbekal pengetahuan dasar yang diperoleh dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan Helen Keller. Meskipun pengetahuan yang dimiliki masih terbatas, sekolah ini berusaha keras untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi ABK, menunjukkan potensi dan komitmen yang patut diapresiasi.

Namun, meski ada upaya positif dari pihak sekolah, penolakan terhadap ABK masih merupakan masalah yang signifikan. Kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang optimal untuk ABK memperburuk situasi. Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam pendidikan, perlu memberikan perhatian lebih pada pengembangan kebijakan dan sumber daya yang memadai untuk sekolah inklusi.

Lebih jauh lagi, tingkat kesadaran masyarakat mengenai sekolah inklusi dan hak-hak ABK masih tergolong rendah. Banyak orang tua dan anggota masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa ABK berhak menerima layanan pendidikan di sekolah umum dan dapat berintegrasi dengan anak-anak di kelas reguler. Kurangnya pemahaman ini sering kali berujung pada stigma dan eksklusif, yang memperburuk tantangan yang dihadapi oleh ABK dan institusi pendidikan mereka.

SD Negeri 25 Banda Aceh berdiri sebagai contoh yang menunjukkan bagaimana sekolah-sekolah dapat membuat kemajuan menuju inklusi dengan sumber daya yang terbatas. Namun, untuk mencapai inklusi pendidikan yang sesungguhnya, diperlukan upaya kolektif dari semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga

pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan memahami kebutuhan ABK. Hanya dengan pendekatan holistik dan dukungan berkelanjutan, sekolah dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang dalam sistem pendidikan.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bukanlah simbol kegagalan; sebaliknya, kecacatan atau kekurangan kognitif dan fisik tidak seharusnya menjadi penghalang bagi mereka untuk mencapai prestasi. Sebagaimana halnya dengan anak-anak lainnya, ABK memiliki potensi luar biasa yang dapat berkembang dengan dukungan dan fasilitas yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi. Kebutuhan akan manajemen yang efektif dalam menyediakan layanan pendidikan inklusi yang berkualitas adalah hak setiap anak.

Sekolah memiliki kewajiban untuk mendukung dan memberikan layanan yang optimal guna memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan potensi setiap anak, tanpa terkecuali. Meskipun demikian, penelitian yang ada saat ini sering kali belum mengkaji secara mendalam aspek manajemen dalam konteks layanan pendidikan inklusif. Padahal, aspek ini merupakan komponen krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan inklusi di sekolah dasar.

Manajemen layanan yang efektif adalah kunci utama dalam memastikan bahwa kebutuhan semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat dipenuhi dengan baik. Tanpa manajemen yang terencana dan berorientasi pada kebutuhan individu, upaya untuk mencapai pendidikan inklusi yang berkualitas akan mengalami hambatan signifikan. Oleh karena itu, penelitian yang fokus pada aspek manajerial ini sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan inklusi yang sesungguhnya dan memajukan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Selain itu, manajemen layanan juga berkaitan dengan keterlibatan stakeholder termasuk guru, orang tua, dan masyarakat, dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program sangat mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan layanan sekolah inklusif di sekolah dasar. Dalam konteks ini, penekanan pada aspek

manajemen dalam konteks layanan inklusif di sekolah dasar menjadi sangat penting untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Saat ini, terdapat realitas di lapangan dimana meskipun telah ditunjuk banyak sekolah sebagai lembaga yang menyediakan manajemen inklusi, namun dalam implementasinya masih ditemukan banyak kekurangan dan ketidaksesuaian di pihak sekolah, terutama terkait manajemen kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana. Kondisi ini memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara mendalam. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang Manajemen Layanan Pendidikan Inklusi di SDN 25 Kota Banda Aceh. Selain itu, perlu dicatat bahwa penelitian tentang manajemen layanan pendidikan inklusi di SDN 25 Kota Banda Aceh belum pernah dilakukan sebelumnya.

Layanan adalah bentuk komitmen yang mendalam untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan orang lain. Ketika kita memberikan layanan, terutama dalam konteks pendidikan inklusif, kita melayani individu manusia dengan berbagai latar belakang dan karakteristik yang unik. Setiap siswa, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki kebutuhan dan harapan yang perlu dipenuhi. Kita tidak hanya melayani objek mati; kita melayani manusia dengan hati dan perasaan, sehingga pendekatan kita haruslah menyentuh dan relevan secara emosional.

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, berbagai masalah muncul, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya pelatihan bagi guru, kebijakan yang tidak konsisten, serta lemahnya dukungan pada aspek manajerial dan dari pemerintah. Masalah-masalah ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji dan mengembangkan model manajemen yang lebih efektif dalam layanan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita mengenai implementasi pendidikan inklusif di sekolah. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta kebutuhan manajerial, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga yang akan memperbaiki praktik pendidikan inklusi di masa depan.

Penelitian ini mengangkat judul “Analisis Manajemen Layanan Pendidikan Inklusif” (Studi Kasus di SDN 25 Kota Banda Aceh) untuk mengeksplorasi secara

mendalam aspek manajerial dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, serta merumuskan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas layanan pendidikan bagi semua siswa.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dari studi ini adalah: Manajemen layanan pendidikan seperti apa yang dapat menyediakan layanan pendidikan inklusif dan berkualitas, serta didukung dan diimplementasikan oleh satuan pendidikan sekolah dasar di Banda Aceh? Pertanyaan penelitian berikut ini diajukan untuk memperluas studi ini:

1. Bagaimana Perencanaan Layanan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri 25 Banda Aceh?
2. Bagaimana Pengorganisasian Layanan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri 25 Banda Aceh?
3. Bagaimana Pelaksanaan Layanan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri 25 Banda Aceh?
4. Bagaimana Pengendalian Layanan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri 25 Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menilai, mengidentifikasi, memahami, menginterpretasikan, dan menemukan teori dan praktik baru dalam manajemen mutu layanan pendidikan inklusif yang dapat diimplementasikan oleh Sekolah Dasar (SD) di Kota Banda Aceh. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Teranalisisnya Perencanaan Layanan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri 25 Banda Aceh?
2. Teranalisisnya Pengorganisasian Layanan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri 25 Banda Aceh?
3. Teranalisis Pelaksanaan Layanan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri 25 Banda Aceh?
4. Teranalisis Pengendalian Layanan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri 25 Banda Aceh?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disebutkan, penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Pengembangan teori administrasi pendidikan khususnya Manajemen layanan Pendidikan Inklusif.
2. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan model manajemen yang efektif untuk mengelola layanan pendidikan inklusif. Ini termasuk strategi, kebijakan, dan praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh sekolah dasar.
3. Peningkatan pemahaman tentang implementasi inklusi dengan mengeksplorasi bagaimana layanan pendidikan inklusif dikelola di sekolah dasar, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan dan keberhasilan dalam mengimplementasikan inklusi di lingkungan pendidikan.
4. Penyesuaian dan pengembangan kurikulum dari hasil penelitian dapat digunakan untuk menginformasikan pengembangan dan penyesuaian kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dengan berbagai latar belakang dan kemampuan, sehingga mendukung keberagaman dan inklusi.
5. Peningkatan efektivitas kebijakan pendidikan, dengan penelitian ini dapat memberikan data dan analisis yang mendukung pembuatan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berbasis bukti, khususnya yang berkaitan dengan inklusi di sekolah dasar.
6. Kontribusi terhadap menambah jumlah literatur akademik yang tersedia di bidang administrasi pendidikan dan manajemen layanan pendidikan inklusif, yang dapat menjadi referensi bagi peneliti lain di masa depan.
7. Penelitian ini dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan staf sekolah dalam mengelola dan mendukung layanan pendidikan inklusif.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Perbaikan strategi manajemen, yaitu dapat menghasilkan strategi manajemen yang lebih efektif dan efisien untuk mengelola layanan pendidikan inklusif, membantu kepala sekolah dan administrator dalam mengoptimalkan sumber daya dan mendukung semua siswa.
2. Pengembangan kebijakan sekolah yaitu dengan temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan atau merevisi kebijakan sekolah yang mendukung inklusi, seperti prosedur manajemen sekolah inklusi.
3. Pelatihan dan pengembangan guru yaitu dengan hasil penelitian dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan guru dan staf sekolah dalam mendukung pendidikan inklusif, membantu merancang program pelatihan yang relevan dan efektif untuk meningkatkan kompetensi mereka.
4. Peningkatan dukungan untuk siswa dengan kebutuhan khusus yaitu dengan mengidentifikasi praktik terbaik dalam manajemen layanan inklusif, sekolah dapat menyediakan dukungan yang lebih baik bagi siswa dengan kebutuhan khusus, termasuk akses ke sumber daya, teknologi bantuan, dan layanan pendukung lainnya.
5. Peningkatan kerjasama dengan orang tua dan komunitas, bisa memberikan wawasan tentang bagaimana meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan komunitas dalam mendukung pendidikan inklusif, menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi siswa.
6. Pengembangan lingkungan belajar yang Inklusif yaitu dengan temuan penelitian dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan ramah bagi semua siswa, termasuk pengaturan fisik kelas, bahan ajar yang beragam, dan metode pengajaran yang inklusif.
7. Pengukuran dan evaluasi keberhasilan yaitu dengan penelitian ini bisa membantu sekolah dalam mengembangkan metode untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan program inklusi, memastikan bahwa tujuan pendidikan inklusif tercapai dan memberikan data untuk perbaikan berkelanjutan.
8. Peningkatan kepuasan dan prestasi siswa.

1.4.3 Manfaat dari Segi Kebijakan

1. Analisis ini dapat menginformasikan pengembangan kebijakan yang meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua anak, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Kebijakan ini mungkin mencakup pelatihan untuk guru, penyesuaian kurikulum, atau penyediaan sumber daya tambahan.
2. Hasil penelitian dapat membantu dalam merancang kebijakan dan menjadi bantuan untuk naskah akademik rancangan kebijakan, pedoman dan standar nasional atau daerah untuk pendidikan inklusif, memastikan bahwa sekolah dasar memiliki acuan yang jelas untuk implementasi layanan inklusif.
3. Penelitian ini dapat memandu pemerintah dalam alokasi dana dan sumber daya yang lebih efisien untuk sekolah yang menerapkan layanan inklusif, memastikan bahwa sekolah memiliki akses yang memadai untuk mendukung semua siswa.
4. Kebijakan yang dihasilkan dari analisis ini dapat mencakup mekanisme evaluasi dan monitoring yang lebih baik untuk memastikan efektivitas program inklusi dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.
5. Kebijakan dapat difokuskan pada peningkatan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru untuk menangani berbagai kebutuhan siswa dengan lebih efektif.

1.4.4 Manfaat Dari Segi Isu Dan Aksi Sosial

1. Penelitian ini dapat membantu dalam mengurangi stigma terhadap siswa dengan kebutuhan khusus, mendorong masyarakat untuk lebih menerima dan mendukung pendidikan inklusif.
2. Menyebarluaskan temuan penelitian kepada masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya inklusi dan kontribusi siswa dengan kebutuhan khusus dalam masyarakat.
3. Masyarakat dan orang tua dapat lebih aktif terlibat dalam proses pendidikan jika mereka memahami manfaat dan tantangan pendidikan inklusif, mendukung program inklusi di tingkat sekolah.
4. Penelitian ini dapat memotivasi berbagai inisiatif sosial, seperti kampanye kesadaran atau program dukungan komunitas, untuk mendukung anak-anak

dengan kebutuhan khusus dan memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang setara.

5. Penelitian dapat mendukung advokasi untuk perubahan sosial dan kebijakan dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok advokasi, dalam upaya mempromosikan pendidikan inklusif.
6. Pendidikan inklusif tidak hanya mendukung pencapaian akademik tetapi juga kesejahteraan sosial dan emosional siswa, yang penting untuk perkembangan anak secara keseluruhan.

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Dalam rangka memberikan gambaran kandungan setiap bab, urutan penulisan, dan keterkaitan satu bab dengan bab lainnya secara utuh, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I: Membahas Latar Belakang Persoalan, yang berisi Berbagai Isu Permasalahan dalam Manajemen layanan pendidikan inklusif, sekolah inklusi, dan Paparan Data Hasil Riset sebagai Data Otentik yang sangat Mendalam bahwa Kebutuhan akan Manajemendalam Pengelolaan layanan Pendidikan Inklusif sangat perlu untuk diperhatikan.
- Bab II: Menyajikan Kajian Pustaka Tentang Konsep Manajemen Layanan Pendidikan Inklusif. Fungsi Manajemen Layanan Pendidikan Inklusif.
- Bab III: Bab ini menyajikan Metode Penelitian yang meliputi di antaranya Desain Penelitian, Partisipan dan Tempat Penelitian, Pengumpulan Data, Jenis Data, Instrumen Penelitian, dan Analisis Data.
- Bab IV: Bab Ini Menyajikan Temuan Hasil dan Pembahasan, yaitu Analisis Manajemen Layanan Pendidikan Inklusif dan, Adanya Rumusan Model Manajemen Layanan Pendidikan Inklusi, untuk Meningkatkan Layanan Pendidikan Inklusif.
- Bab V: Bab Ini Berisi Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi Hasil Penelitian Agar Memiliki Kebermanfaatan dan Berkelanjutan Bagi Semua Pihak